
ARTICLE

Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dalam Kerangka Integrasi Ekonomi ASEAN: Strategi Penguatan Ekspor Produk Maritim ke Filipina

Rara Gusnita Putri^{1*}, Simon Sumanjoyo², Irsyaad Suharyadi

^{1,2,3} Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Rara Gusnita Putri, Simon Sumanjoyo, Irsyaad Suharyadi (2026) Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dalam Kerangka Integrasi Ekonomi ASEAN: Strategi Penguatan Ekspor Produk Maritim ke Filipina

Article History

Received: 17 April 2026

Accepted: 18 Mei 2026

Keywords:

Keyword 1: Blue Economy

Keyword 2: ASEAN

Economic Integration

Keyword 3: Maritime

Exports

Keyword 4: Indonesia-
Philippines Trade

Keyword 5: Sustainable
Development

Kata Kunci:

Kata Kunci 1: Ekonomi
Biru

Kata Kunci 2: Integrasi
Ekonomi ASEAN

Kata Kunci 3: Ekspor
Maritim

Kata Kunci 4:
Perdagangan Indonesia-
Filipina

Kata Kunci 5:
Pembangunan
Berkelanjutan

ABSTRACT

Indonesia possesses abundant marine resources and has increasingly promoted the blue economy as a key pillar of sustainable development. At the same time, ASEAN economic integration has created broader opportunities for intra-regional trade, including the expansion of Indonesia's maritime exports to the Philippines, one of the most promising markets in Southeast Asia. This study aims to analyze the implementation of Indonesia's blue economy policy in strengthening maritime product exports to the Philippines within the framework of ASEAN economic integration. The research employs a qualitative approach through literature review and document analysis of government policies, trade reports, publications from international organizations, and relevant academic literature. The findings indicate that the implementation of the blue economy contributes to enhancing the competitiveness of maritime products through sustainable marine resource management, downstream industry development, and value-added processing of fisheries and marine commodities. Furthermore, ASEAN economic integration provides opportunities through improved trade connectivity, regulatory harmonization, and the development of regional supply chains that facilitate Indonesia's access to the Philippine market. Nevertheless, several challenges remain, including non-tariff barriers, increasingly stringent sustainability standards, and limitations in maritime logistics infrastructure. The study concludes that the synergy between Indonesia's blue economy policy and ASEAN economic integration can serve as an effective strategy for strengthening maritime exports to the Philippines while simultaneously promoting sustainable economic development.

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar dan terus mendorong implementasi kebijakan ekonomi biru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, integrasi ekonomi ASEAN membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan perdagangan intra-kawasan, termasuk ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina sebagai salah satu pasar potensial di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan

* Corresponding Author

Email : rara.gusnitaputri@fisip.unila.ac.id

ekonomi biru Indonesia dalam mendukung penguatan ekspor produk maritim ke Filipina dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen terhadap berbagai kebijakan pemerintah, laporan perdagangan, publikasi organisasi internasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk maritim melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, penguatan hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah komoditas perikanan dan kelautan. Selain itu, integrasi ekonomi ASEAN memberikan peluang melalui peningkatan konektivitas perdagangan, harmonisasi regulasi, dan pengembangan rantai pasok regional yang mendukung akses pasar Indonesia ke Filipina. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan berupa hambatan non-tarif, standar keberlanjutan yang semakin ketat, serta keterbatasan infrastruktur logistik maritim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara implementasi kebijakan ekonomi biru nasional dan pemanfaatan integrasi ekonomi ASEAN dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

A. INTRODUCTION

Meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan menipisnya sumber daya alam telah mendorong berbagai negara untuk mengadopsi strategi pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir adalah ekonomi biru (*blue economy*), yaitu konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut (Pauli, 2010; World Bank, 2017). Konsep ini menjadi semakin relevan bagi negara-negara maritim yang berupaya memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Sektor perikanan, budidaya laut, industri pengolahan hasil laut, dan perdagangan maritim berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Potensi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan yang mencakup penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya berkelanjutan, perluasan kawasan konservasi laut, dan hilirisasi produk kelautan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk maritim Indonesia di pasar internasional.

Implementasi ekonomi biru juga menjadi semakin penting dalam konteks integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara. Melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), negara-negara anggota ASEAN terus memperkuat kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan, peningkatan investasi, dan pengembangan konektivitas kawasan (ASEAN, 2023). Selain itu, ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Blue Economy Framework* sebagai pedoman untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pembangunan ekonomi kawasan (ASEAN, 2023). Kerangka tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas perdagangan maritim sekaligus memperkuat implementasi ekonomi biru dalam konteks kerja sama regional. Di antara negara anggota ASEAN, Filipina merupakan salah satu pasar yang potensial bagi produk maritim Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, jumlah penduduk yang besar, serta meningkatnya kebutuhan terhadap produk perikanan dan hasil laut menjadikan Filipina sebagai tujuan ekspor yang strategis (Asian Development Bank, 2024). Selain itu, kedekatan geografis dan hubungan bilateral yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Filipina memberikan keuntungan dalam pengembangan perdagangan maritim. Berbagai produk seperti ikan, udang, rumput laut, dan produk olahan hasil laut memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia di pasar Filipina (International Trade Centre, 2024).

Meskipun demikian, upaya penguatan ekspor produk maritim Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan non-tarif, standar keberlanjutan yang semakin ketat, keterbatasan infrastruktur logistik maritim, serta persaingan dari negara-negara ASEAN lainnya menjadi faktor yang memengaruhi daya saing ekspor Indonesia (United Nations Conference on Trade and Development, 2023). Di sisi lain, kajian yang menghubungkan implementasi kebijakan ekonomi biru dengan peluang ekspor maritim dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek lingkungan dari ekonomi biru atau pada integrasi ekonomi ASEAN secara terpisah, sehingga diperlukan analisis yang mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan ekonomi biru, integrasi ekonomi regional, dan penguatan ekspor maritim Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia dalam mendukung penguatan ekspor produk maritim ke Filipina dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia dalam mendukung pengembangan ekspor maritim, mengidentifikasi peluang yang dihasilkan oleh integrasi ekonomi ASEAN bagi perluasan ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya saing produk maritim Indonesia di pasar Filipina. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama ekonomi regional, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perdagangan maritim yang berkelanjutan.

B. LITERATURE REVIEW

Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep ekonomi biru (*blue economy*) berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Menurut Pauli (2010), ekonomi biru berupaya menciptakan nilai ekonomi melalui inovasi yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Kajian yang dilakukan oleh Smith-Godfrey (2016) menunjukkan bahwa ekonomi biru memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara maritim melalui pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan perdagangan maritim. Sementara itu, penelitian oleh Voyer et al. (2018) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang efektif, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Indonesia, ekonomi biru menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut mencakup penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya berkelanjutan, perluasan kawasan konservasi laut, dan hilirisasi produk kelautan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), implementasi ekonomi biru diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor kelautan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Purnomo (2022) menemukan bahwa program hilirisasi hasil perikanan mampu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi, infrastruktur logistik, dan akses pasar internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru tidak hanya memerlukan dukungan kebijakan, tetapi juga penguatan tata kelola dan koordinasi antarsektor.

Integrasi Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Maritim

Integrasi ekonomi ASEAN melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) bertujuan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal yang memungkinkan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil bergerak lebih bebas di kawasan ASEAN (ASEAN, 2023). Integrasi ini memberikan peluang bagi negara anggota untuk meningkatkan perdagangan intra-kawasan, termasuk perdagangan produk maritim. Penelitian yang dilakukan oleh Yoshimatsu (2021) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi regional mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas akses pasar bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, *ASEAN Blue Economy Framework* yang diadopsi pada tahun 2023 menekankan pentingnya pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pertumbuhan kawasan. Kerangka tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan maritimnya dalam memperluas ekspor ke negara-negara ASEAN, termasuk Filipina.

Ekspor Produk Maritim Indonesia ke Filipina

Filipina merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan meningkatnya kebutuhan terhadap produk pangan berbasis kelautan menjadikan Filipina sebagai pasar potensial bagi produk maritim Indonesia. Berdasarkan data International Trade Centre (2024), produk perikanan, rumput laut, dan hasil olahan laut Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pangsa pasar di Filipina. Penelitian oleh Abrenica dan Ducanes (2022) menunjukkan bahwa perdagangan produk pangan dan perikanan antara negara-negara ASEAN terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin terbukanya pasar regional. Namun demikian, hambatan non-tarif, standar kualitas produk, dan persaingan dengan negara eksportir lain masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan ekspor produk maritim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan efisiensi distribusi produk.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai ekonomi biru umumnya berfokus pada aspek keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya kelautan, sementara penelitian mengenai integrasi ekonomi ASEAN lebih banyak menyoroti liberalisasi perdagangan dan kerja sama ekonomi regional. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia, integrasi ekonomi ASEAN, dan penguatan ekspor produk maritim ke Filipina masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis

bagaimana implementasi kebijakan ekonomi biru dapat mendukung peningkatan daya saing dan ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN.

C. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia dalam mendukung penguatan ekspor produk maritim ke Filipina dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumentasi, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan ASEAN, statistik perdagangan, publikasi organisasi internasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan ekonomi biru, integrasi ekonomi ASEAN, dan perdagangan maritim Indonesia–Filipina. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan, data perdagangan, dan publikasi akademik.

D. RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dalam Mendukung Ekspor Produk Maritim

Ekonomi biru telah menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui program penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya berkelanjutan, perluasan kawasan konservasi laut, serta hilirisasi produk perikanan dan kelautan. Berdasarkan dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), kebijakan ekonomi biru diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk maritim yang memiliki daya saing di pasar internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan penguatan industri pengolahan hasil laut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia. Produk perikanan yang telah melalui proses pengolahan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan produk primer. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi faktor penting dalam memenuhi tuntutan pasar internasional yang semakin memperhatikan aspek lingkungan dan ketertelusuran produk (*traceability*). Temuan ini sejalan dengan konsep ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Pauli, 2010, p. 14). Dengan demikian, implementasi kebijakan ekonomi biru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konservasi, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing ekspor produk maritim Indonesia.

Peluang Ekspor Produk Maritim Indonesia ke Filipina

Filipina merupakan salah satu negara tujuan ekspor potensial bagi produk maritim Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, jumlah penduduk yang besar, dan tingginya konsumsi produk perikanan menciptakan peluang pasar yang signifikan bagi eksportir Indonesia. Berdasarkan data perdagangan internasional, komoditas seperti ikan tuna, udang, rumput laut, dan produk olahan hasil laut menjadi produk yang memiliki prospek ekspor yang cukup tinggi ke pasar Filipina (International Trade Centre, 2024). Selain faktor permintaan pasar, kedekatan geografis antara Indonesia dan Filipina memberikan keuntungan berupa biaya logistik yang relatif lebih rendah dibandingkan ekspor ke pasar di luar kawasan ASEAN. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya rantai pasok regional yang lebih efisien serta memperkuat konektivitas perdagangan maritim antara kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput laut dan produk turunannya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia, sementara industri pengolahan pangan dan farmasi di Filipina membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan ekspor produk berbasis rumput laut dapat menjadi salah satu strategi yang mendukung implementasi ekonomi biru sekaligus meningkatkan nilai ekspor nasional.

Integrasi Ekonomi ASEAN dan Penguatan Perdagangan Maritim

Integrasi ekonomi ASEAN melalui ASEAN Economic Community telah menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka bagi negara-negara anggota. Pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan konektivitas kawasan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar produk maritim ke Filipina dan negara ASEAN lainnya (ASEAN, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN berperan dalam mendukung penguatan perdagangan maritim melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kerja sama logistik, dan pengembangan rantai pasok regional. Selain itu, adopsi ASEAN Blue Economy Framework menunjukkan adanya komitmen regional untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi maritim. Kerangka tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya sebagai negara maritim dalam memperluas ekspor berbasis ekonomi biru. Dalam perspektif regionalisme ekonomi, integrasi kawasan dapat meningkatkan efisiensi perdagangan melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan akses pasar (Yoshimatsu, 2021). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen liberalisasi perdagangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru.

Tantangan dalam Penguatan Ekspor Produk Maritim

Meskipun memiliki peluang yang besar, penguatan ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan non-tarif berupa persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, sertifikasi keberlanjutan, serta standar mutu produk menjadi faktor yang memengaruhi akses pasar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur logistik dan tingginya biaya distribusi di beberapa wilayah Indonesia masih menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok maritim. Temuan lain menunjukkan bahwa persaingan dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand semakin meningkat, terutama pada komoditas perikanan yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini mengharuskan Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan keunggulan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi produksi. Menurut pendekatan implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas institusi, koordinasi antaraktor, dan dukungan sumber daya yang memadai (Hill & Hupe, 2014, p. 23). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ekonomi biru dalam mendukung ekspor maritim memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung perdagangan.

Strategi Penguatan Ekspor Produk Maritim Indonesia ke Filipina

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina. Pertama, memperkuat implementasi ekonomi biru melalui peningkatan hilirisasi dan sertifikasi keberlanjutan produk maritim. Kedua, meningkatkan efisiensi logistik maritim melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antarpulau. Ketiga, memperluas kerja sama perdagangan bilateral Indonesia–Filipina dalam bidang perikanan, pengolahan hasil laut, dan investasi maritim. Keempat, mendorong pemanfaatan platform digital dan sistem ketertelusuran produk guna

memenuhi standar pasar internasional. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru dan integrasi ekonomi ASEAN memiliki hubungan yang saling mendukung dalam penguatan ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina. Kebijakan ekonomi biru menyediakan landasan keberlanjutan dan peningkatan daya saing produk, sementara integrasi ekonomi ASEAN menciptakan peluang pasar dan konektivitas perdagangan yang lebih luas. Sinergi keduanya menjadi faktor penting dalam mewujudkan perdagangan maritim yang berkelanjutan dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara.

Table 1. Perdagangan Indonesia–Filipina

Indikator	Nilai (US\$ Miliar)	Keterangan
Total ekspor Indonesia ke dunia	266,53	Nilai ekspor Indonesia tahun 2024
Ekspor Indonesia ke Filipina	10,75	Filipina merupakan salah satu tujuan utama ekspor Indonesia di ASEAN
Pangsa Filipina terhadap ekspor Indonesia ke ASEAN	10,8%	Berdasarkan data perdagangan ASEAN tahun 2024
Ekspor Filipina ke Indonesia	1,05	Berdasarkan data UN Comtrade 2024
Neraca perdagangan Indonesia terhadap Filipina	+9,70	Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Filipina

Source: Diolah penulis berdasarkan data BPS (2024), UN Comtrade (2024), Trade Map–International Trade Centre (2024)

Table 2. Komoditas Ekspor Potensial Indonesia ke Filipina yang Relevan dengan Ekonomi Biru

Komoditas	Kondisi Perdagangan
Ikan dan produk perikanan	Permintaan tinggi untuk konsumsi dan industri pengolahan pangan
Udang dan hasil budidaya laut	Produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor
Rumput laut dan turunannya	Digunakan untuk industri pangan, farmasi, dan kosmetik
Produk olahan hasil laut	Mendukung strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
Gas alam cair (LNG)	Indonesia merupakan salah satu pemasok LNG ke Filipina pada 2024

Source: Diolah penulis berdasarkan data Trade Map (2024), UN Comtrade (2024), FAO Fisheries Statistics (2024)

Table 3. Peluang dan Tantangan Ekspor Produk Maritim Indonesia ke Filipina

Aspek	Peluang	Tantangan
Pasar	Pertumbuhan konsumsi pangan laut di Filipina	Persaingan dengan Vietnam dan Thailand
Logistik	Kedekatan geografis Indonesia–Filipina	Biaya distribusi dan konektivitas pelabuhan
Kebijakan	Dukungan ASEAN Economic Community dan ASEAN Blue Economy Framework	Hambatan non-tarif dan standar mutu
Keberlanjutan	Permintaan produk bersertifikasi berkelanjutan meningkat	Kebutuhan sertifikasi dan <i>traceability</i>
Industri	Potensi hilirisasi hasil laut	Kapasitas pengolahan yang belum merata

Source: Diolah penulis berdasarkan data Trade Map (2024), UN Comtrade (2024), FAO Fisheries Statistics (2024).

Berdasarkan data perdagangan tahun 2024, Filipina menjadi salah satu pasar utama Indonesia di kawasan ASEAN dengan nilai ekspor mencapai sekitar US\$10,75 miliar. Nilai tersebut menunjukkan posisi strategis Filipina sebagai tujuan ekspor Indonesia sekaligus menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan bagi Indonesia. Dalam konteks ekonomi biru, komoditas berbasis sumber daya kelautan seperti ikan, udang, rumput laut, dan produk olahan hasil laut memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan. Selain didukung oleh kedekatan geografis kedua negara, implementasi ASEAN Blue Economy Framework juga membuka peluang bagi peningkatan perdagangan produk maritim yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Namun demikian, penguatan daya saing, sertifikasi keberlanjutan, dan efisiensi logistik tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja ekspor produk maritim Indonesia ke Filipina.

E. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekspor produk maritim ke Filipina. Kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, dan penguatan tata kelola sektor kelautan telah menciptakan fondasi yang mendukung pengembangan perdagangan maritim Indonesia. Dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN, peluang ekspor semakin terbuka melalui peningkatan konektivitas kawasan, harmonisasi regulasi perdagangan, dan penguatan rantai pasok regional yang mempermudah akses produk Indonesia ke pasar Filipina. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Filipina merupakan pasar yang potensial bagi produk maritim Indonesia karena tingginya permintaan terhadap komoditas perikanan dan hasil laut. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain hambatan non-tarif, standar keberlanjutan yang semakin ketat, keterbatasan infrastruktur logistik maritim, serta meningkatnya persaingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ekonomi biru dalam mendukung ekspor maritim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan berbagai pemangku kepentingan untuk beradaptasi terhadap dinamika perdagangan regional dan global.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi biru dan integrasi ekonomi ASEAN merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara keduanya dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing ekspor produk maritim Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan maritim kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu memperkuat implementasi ekonomi biru melalui peningkatan hilirisasi produk maritim, pengembangan infrastruktur logistik, serta perluasan kerja sama perdagangan Indonesia–Filipina dalam kerangka ASEAN. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data perdagangan yang lebih rinci dan pendekatan empiris yang lebih mendalam guna mengukur pengaruh implementasi kebijakan ekonomi biru terhadap kinerja ekspor maritim Indonesia secara kuantitatif.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengapresiasi berbagai institusi dan organisasi yang menyediakan data, dokumen kebijakan, serta publikasi

yang menjadi sumber penting dalam penelitian ini, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ASEAN Secretariat, dan berbagai lembaga internasional yang menerbitkan data perdagangan dan ekonomi maritim. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para reviewer dan kolega akademik yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyempurnaan naskah ini. Segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Contributorship

Penulis bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan penelitian, mulai dari konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan naskah, hingga revisi dan persetujuan akhir manuskrip.

REFERENCES

- Abrenica, J. V., & Ducanes, G. M. (2022). Trade integration and food security in ASEAN: Opportunities and challenges for regional cooperation. *Asian Economic Papers*, 21(3), 89–108.
- Ahmed, N., Thompson, S., & Glaser, M. (2022). Global seafood trade and sustainable blue growth. *Marine Policy*, 138, 104973. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104973>
- ASEAN. (2023). *ASEAN Blue Economy Framework*. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2023). *ASEAN Economic Community Strategic Plan 2025*. Jakarta, Indonesia: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023). Regional economic integration and sustainable maritime development in ASEAN. *ASEAN Economic Bulletin*, 40(2), 121–138.
- Asariotis, R., Benamara, H., & Hoffmann, J. (2022). Maritime transport and global supply chain resilience. *Maritime Economics & Logistics*, 24(4), 635–654.
- Asian Development Bank. (2024). *Asian Development Outlook 2024: Innovation for Sustainable Growth*. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank Institute. (2024). Regional trade connectivity and economic integration in Southeast Asia. *Asian Economic Integration Review*, 16(1), 45–67.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>
- Boonstra, W. J., Österblom, H., & Crona, B. (2021). Blue economy governance and maritime sustainability: Emerging trends and challenges. *Marine Policy*, 129, 104507. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104507>

- Burgess, M. G., Clemence, M., McDermott, G. R., Costello, C., & Gaines, S. D. (2022). Five rules for pragmatic blue growth. *Marine Policy*, 87, 331–339.
- Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Ota, Y., Cheung, W. W. L., & Sun, Z. (2021). Social equity and sustainability in the blue economy. *Ocean & Coastal Management*, 210, 105697. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105697>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Eikeset, A. M., Mazzarella, A. B., Davíðsdóttir, B., Klinger, D. H., Levin, S. A., Rovenskaya, E., & Stenseth, N. C. (2018). What is blue growth? The semantics of sustainable development of marine environments. *Marine Policy*, 87, 177–179. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.019>
- Farmery, A. K., Allison, E. H., Andrew, N. L., & Troell, M. (2021). Aquatic foods and blue economy pathways for sustainable development. *Nature Food*, 2(7), 449–456. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00308-9>
- Febrina, S., Aimon, H., Kurniadi, A. P., & Marta, J. (2025). Assessing the role of the blue economy in strengthening food security: Evidence from lower-middle-income ASEAN countries. *Challenges in Sustainability*, 13(1), 110–121. <https://doi.org/10.56578/cis130108>
- Fitriani, N. R., Rahayu, A. I., & Paramartha, H. R. (2025). Effectiveness of government intervention in regulating tax and incentives towards Indonesia's blue economy sustainability. *Journal of World Trade Studies*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.22146/jwts.v9i1.20066>
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024*. Rome, Italy: FAO.
- Froehlich, H. E., Smith, A., Gentry, R. R., & Halpern, B. S. (2019). Offshore aquaculture: Opportunities and challenges in marine food production. *Annual Review of Marine Science*, 11(1), 221–248. <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-121916-063335>
- Gaines, S. D., Cabral, R. B., Free, C. M., & Mangin, T. (2024). Ocean sustainability and economic growth under the blue economy framework. *Nature Sustainability*, 7(2), 113–122.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd ed.). London, United Kingdom: Sage Publications.
- Hynes, S., Norton, D., & Corless, R. (2024). Blue economy opportunities and sustainable marine governance. *Marine Policy*, 158, 105874.
- International Trade Centre. (2024). *Trade Map Database*. Geneva, Switzerland: International Trade Centre.

- International Trade Centre. (2024). Trade competitiveness and export diversification in ASEAN economies. *International Trade Forum*, 3(1), 18–29.
- Jouffray, J. B., Blasiak, R., Norström, A. V., Österblom, H., & Nyström, M. (2023). The blue acceleration: The trajectory of ocean industrialization. *One Earth*, 6(4), 285–296.
- Keen, M. R., Schwarz, A. M., Wini-Simeon, L., & Boso, D. (2023). Blue economy governance and ocean sustainability in developing countries. *Marine Policy*, 149, 105480.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Roadmap Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2021). The blue economy and the United Nations Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ntona, M., & Schröder, P. (2021). Regulating the blue economy: Governance challenges and opportunities. *Marine Policy*, 132, 104674. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104674>
- Nurhayati, S., & Purnomo, A. (2024). Blue economy implementation and export competitiveness in Indonesia's fisheries sector. *Marine Economics and Management*, 7(2), 95–112.
- Österblom, H., Jouffray, J. B., Folke, C., & Rockström, J. (2022). Reframing the ocean economy for sustainability. *BioScience*, 72(3), 278–289.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Taos, NM: Paradigm Publications.
- Sabrina, O., & Putra, R. A. (2025). Navigating the blue economy: Indonesia's regional efforts in ASEAN to support sustainable practices in fisheries sector. *Sustainability*, 17(15), 6906. <https://doi.org/10.3390/su17156906>
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Review of Maritime Transport 2023*. Geneva, Switzerland: United Nations.
- Voyer, M., Farmery, A., Kajlich, L., Vachette, A., & Quirk, G. (2022). Assessing the blue economy: A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 225, 106227.
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the blue economy mean for oceans governance? *Journal of*

Environmental Policy and Planning, 20(5), 595–616.

<https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>

World Bank. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*. Washington, DC: World Bank.

Yoshimatsu, H. (2021). Regional supply chains and economic integration in ASEAN: Emerging trends and challenges. *Journal of Asian Public Policy*, 14(3), 362–379.

<https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1815276>

Zhang, X., Zhang, Z., & Jia, Y. (2023). Sustainable maritime trade and blue economy development in Southeast Asia. *Ocean & Coastal Management*, 236, 106523.

<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106523>